

**BAB IV**  
**PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU RAYA**  
**DAN IMPLIKASINYA**

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PURWA) yang diadakan pada tanggal 03 April 2013 di IAIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk memilih presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA). Pemilu raya mahasiswa tersebut merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun sekali. Adanya kegiatan tersebut merupakan cerminan demokrasi kampus yang ada di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Secara proses penyelenggarannya pemilu raya di kampus tersebut memang tidak jauh berbeda dengan pemilu pada umumnya.

Secara garis besar pemilihan umum menganut asas “LUBER” yang merupakan singkatan dari ”Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asal “Luber” sudah ada sejak zaman orde baru. Dari masing-masing singkatan di atas mempunyai arti tersendiri diantaranya, Langsung berarti bahwa pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti bahwa pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia), di akses pada 29 Juni 2013.

Kemudian dengan berkembangnya zaman pada era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas tersebut juga mengandung arti bahwa dalam pemilihan umum harus dilaksanakan dengan jujur sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih, serta perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa adanya diskriminasi. Asas tersebut bukan hanya mengikat kepada pemilih dan peserta pemilu tetapi juga kepada penyelenggara pemilu.<sup>2</sup>

Proses penyelenggaraan tersebut menjadi sebuah momentum yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Di IAIN Sunan Ampel Surabaya juga demikian, proses tersebut digunakan untuk memilih wakil mahasiswa, baik di tingkat institut, fakultas, maupun jurusan. Dalam penelitian ini, pembahasan ditujukan pada pemilu raya DEMA 2013. Pemilu raya DEMA 2013 diadakan pada tanggal 03 April 2013. Namun persiapannya sudah dimulai sejak awal bulan Maret 2013, karena untuk menyelenggarakan prosesi besar ini dibutuhkan persiapan yang matang.

#### **A. Proses Penyelenggaraan Pemilu**

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang

---

<sup>2</sup> Ibid

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam pembahasan UU Pemilu tidak sekedar bertujuan untuk mengganti atau memberi mandat baru kepada para penyelenggara negara di bidang legislatif dan eksekutif, tetapi hendaknya dapat memberikan makna yang lebih jauh, yaitu mencapai cita-cita yang terkandung dalam konstitusi, seperti yang tercantum dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan.<sup>3</sup>

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Pada umumnya bahwa Pemilihan Umum merupakan sebuah pesta demokrasi rakyat Indonesia yang sangat dinantikan para pemangku kepentingan untuk

---

<sup>3</sup> Yuddy Chrisnandi, *Beyond Parlemen Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*, (Jakarta: Transwacana, 2008), 17

bertarung memperebutkan pimpinan tertinggi. Seperti Pesta Demokrasi yang ada di Indonesia, dalam dunia kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya kita juga mengenal pesta demokrasi mahasiswa yang memang diadakan rutin setiap tahunnya. Pesta demokrasi kampus itu bernama PURWA (Pemilihan Umum Raya Mahasiswa). Sama halnya seperti pesta demokrasi yang ada di Indonesia, dunia kampus yang bisa kita katakan sebagai miniaturnya negara melakukan sebuah suksesi pada lembaga kemahasiswaan yang khususnya pada lembaga Legislatif yaitu Senat Mahasiswa dan Lembaga Eksekutif yaitu memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). PURWA dalam dunia kampus terbagi dalam dua bagian yaitu PURWA untuk lingkup Universitas yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan PURWADI untuk lingkup fakultas yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (SEMA).

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa atau yang biasa disebut sebagai PURWA dalam pemilihan DEMA di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 merupakan agenda rutin yang pelaksanaannya sudah dirumuskan pada kongres KBMI (Keluarga Besar Mahasiswa IAIN) yang telah disepakati oleh mahasiswa. Kongres KBMI adalah proses perumusan undang-undang yang nantinya dijadikan pedoman oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dan setiap tahun undang-undang ini mengalami perubahan, termasuk di dalamnya juga mengatur undang-undang partai politik dan pemilihan umum raya mahasiswa.

Pemilu kali ini yaitu proses pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang biasa disebut dengan pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) pada

hakekatnya melalui mekanisme yang sama seperti pemilu pada umumnya, meliputi peserta pemilu, kampanye, pencalonan, pemungutan suara, serta penetapan calon pemilih. Tetapi juga ada tahapan-tahapan yang berbeda dengan penyelenggaraan di kampus ini. Karena ruang lingkup atau cakupan di kampus juga lebih sedikit dari pada pemilu pada umumnya. Dalam proses penyelenggaraan pemilu IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahapan-tahapan prosesnya antara lain meliputi pembentukan KOPURWA, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran partai dan capres cawapres, verifikasi partai dan capres cawapres, kampanye partai (oral dan atribut), hari tenang, pencoblosan, perhitungan serta penetapan hasil pemilu dan yang terakhir adalah pelantikan.<sup>4</sup>

### **1. Pembentukan KOPURWA**

Kita mengenal adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemilihan umum, namun di dalam kampus IAIN kita mengenal istilah tersebut sebagai Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KOPURWA). Menurut undang-undang KBMI yang disebut dengan KOPURWA adalah panitia penyelenggara pemilu raya yang mendapat rekomendasi dari DEMA. Pembentukan awal KOPURWA terdiri dari 2 orang yang direkomendasikan oleh DEMA yang nantinya akan menjabat sebagai ketua dan sekretaris KOPURWA dan 2 orang dari masing-masing fakultas yang direkomendasikan oleh SEMA yang nantinya akan menjadi anggota KOPURWA. Keputusan tersebut tercantum dalam UU PURWA tentang Penyelenggaraan dan Organisasi pada Pasal 6. Kemudian 2 orang rekomendasi dari DEMA tersebut

---

<sup>4</sup> Surat KOPURWA tentang Jadwal Tahapan Pemilu Raya Mahasiswa 2013

diserahkan kepada kepala bagian kemahasiswaan rektorat.

Pada pemilu kali ini, Ketua dan sekretarisnya yang terpilih adalah Nur Hakim (Ketua) dan M. Ainun Najib (Sekretaris). Penunjukkan ini dilakukan oleh Presiden DEMA dimisioner yaitu Imam Nawawi yang kemudian disetujui oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan Rektorat Bapak Taufik dan disahkan pada tanggal 18 Februari 2013 yang ditandai dengan turunnya Surat Keputusan (SK) Ketua dan Sekertaris KOPURWA dari DEMA. Setelah itu pada tanggal 07 Maret 2013, untuk Ketua dan Sekretaris terpilih mengirimkan surat pendelegasian anggota KOPURWA kepada semua Gubernur SEMA.

Sebenarnya untuk proses pemilihan ketua dan sekertaris KOPURWA harus mendapatkan rekomendasi dari DEMA dan dari rekom tersebut nantinya dimusyawarahkan dengan anggota DEMA yang lain atau dengan rapat kabinet untuk memutuskan siapa yang menjadi ketua dan sekertaris KOPURWA, akan tetapi pada kenyataannya pemilihan tersebut langsung dengan sistem tunjuk oleh Presiden DEMA dimisioner. Proses penunjukkan tersebut mendapatkan respon dari beberapa pihak. Hal ini dikarenakan proses penunjukan tersebut terkesan tidak demokratis. Dan biasanya penunjukan tersebut diambil dari kelompoknya sendiri. Salah satu yang berkomentar mengenai hal ini adalah Bapak Taufik dari bagian kemahasiswaan rektorat, beliau mengatakan

“alangkah baiknya jika proses penentuan ketua dan sekretaris KOPURWA dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Karena kita tahu bahwa mahasiswa di IAIN dibagi menjadi beberapa kelompok. Jika penentuan tersebut dilakukan dengan penunjukan nanti terkesan ada main politik atau tidak demokrasi dan nantinya yang dipilih cenderung dari kelompok atau kubunya sendiri”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bapak Taufiq, wawancara, di ruang kemahasiswaan rektorat, tanggal 02 Juli 2013

Hal sama juga disampaikan oleh Ketua Partai PAREM yang menyetujui pendapat tersebut, dia mengatakan bahwa

“kalau membaca UU Pemilu Raya Mahasiswa memang Ketua dan Sekretaris KOPURWA tidak ditentukan dengan cara penunjukan dari Ketua DEMA. Padahal DEMA hanya merekomendasikan saja. Jadi penentuannya seharusnya lewat rapat kabinet DEMA dahulu.”<sup>6</sup>

Kemudian Ketua dan Sekretaris membentuk keanggotaan KOPURWA. Jika merujuk pada UU PURWA dalam pemilihan anggota KOPURWA ketua mengirimkan surat pendelegasian kepada masing-masing gubernur SEMA untuk merekomendasikan 2 orang yang akan dijadikan sebagai anggota KOPURWA. Akan tetapi dalam prosesnya pemilihan anggota tersebut direkomendasikan oleh Gubernur SEMA masing-masing fakultas sebanyak 4 nama perwakilan dan diserahkan kepada Ketua KOPURWA.

UU PURWA seharusnya dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pemilu raya tapi kenyataannya masih ada yang belum sesuai. Setelah peneliti mengkonfirmasi kerancuan ini kepada Nur Hakim yang menjabat sebagai Ketua KOPURWA mengatakan

“untuk membentuk anggota atau panitia KOPURWA di setiap distrik kami mengirimkan surat permohonan pendelegasian kepada masing-masing gubernur untuk mengirimkan 4 perwakilan di tiap distrik yang akan dijadikan sebagai anggota KOPURWA. Memang untuk jumlah anggota atau panitia KOPURWA jumlahnya kami tambah dan tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam UU PURWA yang mendelegasikan 2 anggota KOPURWA dalam setiap distrik. Hal ini dimaksudkan nantinya dari 4 orang anggota tersebut akan di roling di beberapa anggota distrik lain, misalnya untuk anggota KOPURWA di distrik syari’ah ada 4 orang, kemudian diambil 2 orang untuk bertukar tempat di distrik lainnya dan yang 2 orang lainnya akan menetap di distriknya masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dan juga agar kinerja kami juga bisa maksimal. Ini tidak dimaksudkan melanggar UU akan tetapi hal ini

---

<sup>6</sup> Huda, ketua PAREM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 11 Juni 2013

ditujukan agar terwujudnya pemilu yang tertib”.<sup>7</sup>

Jika di jumlah keseluruhan anggota KOPURWA ada 25 anggota, untuk 5 anggota disebut panitia sentral yaitu terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan koordinator distrik. Sedangkan untuk 20 anggota KOPURWA itu adalah panitia distrik. Kemudian ketua KOPURWA menurunkan Surat Keputusan (SK) bagi anggota KOPURWA. Setelah pembentukan pengurus KOPURWA selesai, barulah mereka menjalankan tugas dan wewenang mereka sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu Raya Mahasiswa.

KOPURWA mempunyai tugas dan wewenang yang dibawa ketika pemilu. Tugas tersebut merupakan sebuah amanat yang dilaksanakan dan di lakukan oleh KOPURWA. Adapun tugas dan wewenang KOPURWA secara strategis diantaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan PURWA
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai Politik Mahasiswa (PPM) yang berhak sebagai peserta PURWA
3. Membentuk komisi PURWA disemua distrik
4. Membuat tempat pemungutan suara (TPS)
5. Menetapkan keseluruhan hasil PURWA disemua daerah pemulihan distrik untuk menentukan Presiden dan wakil presiden DEMA dan MUSEMA

---

<sup>7</sup> Nur Hakim, ketua KOPURWA, wawancara, di kantin IAIN Sunan Ampel, tanggal 17 Juni 2013

<sup>8</sup> UU Tentang Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik (PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013, tentang Penyelenggaraan dan Organisasi, Bab III pasal 7



6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil PURWA
7. Memimpin tahapan PURWA
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemilu raya
9. Mensosialisasikan nama calon Presiden dan wakil presiden DEMA, serta partai peserta PURWA
10. Menghitung hasil PURWA untuk menemukan anggota MUSEMA, Presiden dan wakil presiden DEMA

Sebagai penyelenggara pemilu, KOPURWA memiliki otoritas antara lain menetapkan peraturan pemilu yang dapat diterima oleh semua pihak dan menegakkannya. Dengan ditetapkan peraturan pemilu tersebut yang dapat ditetapkan sebagai syarat bagi anggota KOPURWA harus netral, maka diharapkan nantinya dalam pelaksanaan pemilihan tidak ada pemihakan penyelenggara terhadap kelompok peserta pemilu tertentu. Jadi penyelenggaraan pemilu bisa dijamin berlangsung secara *fair*.

Jauh-jauh hari sebelum proses penyelenggaraan pemilu, KOPURWA melakukan persiapan-persiapan terkait penyelenggaraan pemilu, antara lain mensosialisasikan proses pendaftaran partai dan kandidat, yang didalamnya berisi tempat dan waktu pendaftaran beserta syarat-syarat partai dan kandidat calon presiden dan wakilnya. Kegiatan tersebut disosialisasikan pada tanggal 21 Maret 2013 dengan cara membuat pamflet besar yang ditempelkan di setiap distrik dan tempat-tempat umum yang ada di area kampus. Setelah itu KOPURWA mendata semua mahasiswa aktif IAIN Sunan Ampel tahun 2012-

2013 dengan cara meminta data tersebut pada setiap akademik fakultas. Data tersebut digunakan untuk mendata mahasiswa yang ikut mencoblos agar tidak terjadi pengulangan atau pencobolsan dua kali. Dan data ini juga digunakan sebagai alat tolak ukur untuk membagi kertas suara pada saat pencoblosan di tiap-tiap distrik. Dibawah ini merupakan tahapan pemilu yang telah di buat oleh KOPURWA dan dilaksanakan ketika jalannya pemilu raya mahasiswa DEMA.

**Tabel IV. I**

**JADWAL TAHAPAN PEMILU RAYA MAHASISWA (PURWA)**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
1	Pembentukan KOPURWA	18 Februari 2013		Terlaksana
2	Penyusunan Daftar Pemilih	19 Maret 2013	21 Maret 2013	Terlaksana
3	Pendaftaran Partai dan Capres Cawapres	22 Maret 2013		Terlaksana
4	Verifikasi Partai dan Capres Cawapres	23 Maret 2013		Terlaksana
5	Kampanye Partai (Oral + Atribut)	28 Maret 2013	01 April 2013	Terlaksana
6	Hari Tenang	02 April 2013		Terlaksana
7	Pencoblosan	03 April 2013		Terlaksana
8	Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilu	03 April 2013		Terlaksana
9	Pelantikan	24 Mei 2013		Terlaksana

Sumber: data Sekretaris KOPURWA

## **2. Penyusunan Daftar Pemilih**

Pendataan daftar pemilih merupakan proses dimana KOPURWA mendata semua mahasiswa yang nantinya menjadi pemilih dalam pemilu raya mahasiswa. Sebelum melakukan pendataan tersebut KOPURWA mengadakan rapat intern yang membahas tentang kriteria pemilih. Setelah itu, barulah KOPURWA menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses pendataan ini dilakukan oleh KOPURWA dengan meminta data mahasiswa aktif kepada seluruh akademik di masing-masing fakultas. Dan dalam pemilu ini juga KOPURWA membatasi kriteria pemilih, yaitu yang berhak mencoblos adalah semua mahasiswa aktif mulai dari angkatan 2009 sampai 2012 atau mulai semester delapan sampai semester dua. Data yang diperoleh KOPURWA adalah daftar nama mahasiswa beserta semester, fakultas, dan jurusan. Data ini yang nantinya menjadi pedoman KOPURWA dalam mendata mahasiswa ketika proses pencoblosan.

Untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KOPURWA mengambil kebijakan hanya pada angkatan 2009 sampai angkatan 2012. Hal ini dikarenakan jika angkatan 2008 atau angkatan 2007 ikut mencoblos akan mempersulit KOPURWA untuk mendata pemilih dan kebanyakan dari angkatan tersebut sudah banyak yang lulus atau diwisuda, sedangkan nama mereka masih tercantum dalam data mahasiswa aktif. Sebagaimana disampaikan oleh ketua KOPURWA

“KOPURWA sengaja membatasi jumlah DPT, yakni yang termasuk DPT adalah angkatan 2009-2012. Kami menilai bahwa jika DPT diambil secara keseluruhan mahasiswa aktif maka akan kurang maksimal, karena banyak mahasiswa angkatan di atas 2009 hanya sedikit mahasiswa yang masih tergolong mahasiswa aktif, tetapi mereka juga jarang ke kampus. Jadi dari pihak kami memberikan kebijakan seperti itu”<sup>9</sup>

Adanya pembatasan tersebut merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh KOPURWA, karena secara aturan UU Pemilihan Umum Raya Mahasiswa tidak mengatur adanya pembatasan tersebut. Dan adanya pembatasan tersebut sebenarnya merugikan mahasiswa, karena secara tidak langsung hal tersebut mengambil hak mahasiswa untuk ikut serta dalam pemilu raya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan dari angkatan 2008 yang juga ikut serta dalam pemilu kemarin:

“saya selalu ikut serta dalam pemilu raya mahasiswa sejak dulu, makanya dalam pemilu kali ini saya juga ikut mencoblos. Tetapi ketika saya duduk di semester sepuluh sekarang ini kenapa harus ada pembatasan?. Padahal saya juga masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Saya rasa pembatasan itu tidak usah diterapkan. Karena dalam proses pemilu seharusnya semua mahasiswa dilibatkan, dan itu lebih demokratis menurut saya.”<sup>10</sup>

Berikut ini adalah jumlah DPT yang terdaftar dalam pemilu raya mahasiswa 2013 yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif serta jumlah mahasiswa yang tercatat ikut berpartisipasi dalam pemilu raya.

---

<sup>9</sup> Nur Hakim, ketua KOPURWA, wawancara, di kantin IAIN Sunan Ampel, tanggal 17 Juni 2013

<sup>10</sup> Kholid (nama samaran), mahasiswa semester 10 fakultas tarbiyah yang mengikuti pemilu raya, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 09 Juli 2013

**Tabel IV. 2****JUMLAH MAHASISWA AKTIF DAN JUMLAH PEMILIH**

<b>NO</b>	<b>Fakultas</b>	<b>Mahasiswa Aktif</b>	<b>Mahasiswa yang ikut memilih</b>
1	Tarbiyah	2353	1090
2	Dakwah	2198	204
3	Adab	1285	402
4	Ushuluddin	852	263
5	Syari'ah	1940	204
Jumlah		8628	2163

Sumber data: Laporan Hasil Kegiatan Pemilu Raya Mahasiswa IAIN Sunan Ampel dan Data Mahasiswa Aktif

### **3. Pendaftaran Partai dan Kandidat Capres Cawapres**

Pada pendaftaran partai serta kandidat presiden dan wakil presiden merupakan langkah awal bagi peserta yang akan mengikuti pemilu. Pada tahapan ini peserta pemilu, baik itu partai, capres atau cawapres harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KOPURWA. Pendaftaran ini dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2013 di kantor KOPURWA. Adapun partai politik yang telah di tentukan oleh KOPURWA ada dua yaitu partai politik lama dan partai politik baru. Persyaratan keduanya sama-sama mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Wajib memenuhi struktur kepengurusan partai, Partai Politik Mahasiswa (PPM) telah mengikuti kontestasi pemilu raya tingkat institut, menyerahkan uang pendaftaran, PPM harus mempunyai nama dan lambang permanen, serta harus mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Perbedaan persyaratan antara keduanya hanya

terletak pada jumlah KTP yang di tentukan oleh KOPURWA, diantaranya untuk PPM lama persyaratan KTMnya harus berjumlah 800 suara dan persyaratan partai baru jumlah KTMnya harus 1000 suara dengan hitungan 200 suara di setiap distrik atau fakultas.

a). Pendaftaran Partai Politik

Partai politik sebagai salah satu wadah untuk berpartisipasi dalam politik. Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan juga mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama, mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Di dalam negara yang sedang berkembang partai politik merupakan sarana penting dalam kehidupan politiknya, sekalipun mempunyai banyak kelemahan. Setidaknya di negara yang keabsahan pemerintahannya sedikit banyak diuji oleh berjuta-juta rakyat dalam pemilihan umum berkala, partai-partai politik dan organisasi kekuatan sosial politik hanya menduduki tempat yang menentukan.<sup>11</sup>

Di dunia kampus kita juga mengenal adanya Partai Politik Mahasiswa (PPM). PPM merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan suatu kepentingan, baik kepentingan anggotanya maupun kepentingan mahasiswa IAIN Sunan

---

<sup>11</sup> Wahyu, Efendi, *Skripsi Studi Komparatif tentang mekanisme pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu tahun 2004 dengan pemilihan Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd menurut Al-Maududi. 2004. Hal. 33*

Ampel secara umum. Untuk menjadi peserta pemilu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka, persyaratan tersebut mencakup beberapa hal, yaitu secara administratif dan kepartaian. *Pertama*, secara administratif maksudnya calon partai harus memenuhi administrasi yang sudah ditentukan KOPURWA, seperti mengisi formulir pendaftaran, melampirkan data-data keorganisasian partai, membayar uang pendaftaran, dan lain-lain, *Kedua*, secara kepartaian maksudnya adalah calon partai harus memenuhi syarat-syarat keorganisasian partai, seperti mempunyai nama, lambang, struktur kepengurusan, AD/ART dan lain-lain.

Untuk pemilu 2013 ini terdapat dua PPM yang menjadi peserta pemilu raya mahasiswa yaitu Partai Republik Mahasiswa (PAREM) dan Partai Revolusi Mahasiswa (PRM). PRM merupakan partai yang didirikan oleh PMII Surabaya, partai ini diketua oleh Elit Brawijaya, dia adalah mahasiswa Fakultas Dakwah yang juga merupakan kader dari PMII Surabaya Rayon Dakwah. Partai ini didirikan pada tanggal 21 Mei 2006 atas dasar kebangsaan, demokratis dan terbuka. Partai ini disupport oleh PMII Surabaya dan berkoalisi dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM).<sup>12</sup>

Adapun partai oposisinya adalah Partai Republik Mahasiswa (PAREM). Partai ini didirikan oleh PMII Surabaya Selatan (SS) pada 27 Maret 2007 yang diketuai oleh Miftah Huda. Partai ini berasaskan

---

<sup>12</sup> Elit, ketua PRM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 10 Juni 2013.

pancasila dan prinsip perjuangannya adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.<sup>13</sup> Partai ini mempunyai basis masa terbesar di Fakultas Tarbiyah, karena yang mensupport partai ini adalah PMII Surabaya Selatan. Partai ini berkoalisi dengan CSS Mora, Paduan Suara, Setia Hati, dan beberapa organisasi lain.

Kedua partai tersebut sejak awal memang sudah terjadi persaingan, memang persaingan itu tidak melalui fisik, melainkan strategi. Karena kedua partai ini diusung oleh dua organisasi besar di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya. yaitu PMII Surabaya dan PMII Surabaya Selatan. Persaingan ini sudah terlihat sejak prosesi pengumpulan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Sebagaimana diungkapkan oleh ketua (PAREM):

“sebenarnya kami mempunyai strategi bagus dalam mengumpulkan KTM, yakni kami membagi anggota kita untuk menyebar ke beberapa pesantren, kos, forum warung kopi, ormek, Organisasi Mahasiswa Daerah (ORMADA, dan lain-lain. Namun ketika anggota kami akan meminjam KTM dari Mahasiswa, kebanyakan dari mereka menjawab jika KTM mereka sudah ada yang meminjam. Tapi kami tetap optimis bahwa masih banyak cela untuk kita sukses dalam pemilu ini”<sup>14</sup>

Dari wawancara di atas kita mengetahui bahwa sejak awal sudah terjadi kompetisi antara kedua partai ini. Adapun strategi yang diterapkan oleh partai PRM dalam mengumpulkan KTM salah satunya dengan cara mengadakan koordinasi dengan Kosma (Ketua Kelas). Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan:

---

<sup>13</sup> Huda, ketua PAREM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 11 Juni 2013

<sup>14</sup> Ibid



“salah satu strategi yang kita gunakan yaitu memanfaatkan Kosma sebagai sarana untuk mendapatkan KTM mahasiswa, karena biasanya Kosma itu lebih dipercaya oleh mahasiswa. Jadi target kita juga harus menghendel setiap Kosma agar lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan KTM mahasiswa”.<sup>15</sup>

Pembentukan partai ini memang membutuhkan kerja keras dari pengurus partai, karena selain persyaratan yang berat, pengurus juga tidak mempunyai waktu banyak untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, salah satunya pengumpulan KTM. Oleh karena itu setiap partai mengandalkan segala cara agar partainya dapat lolos dalam pemilu kali ini, salah satunya dengan mendapatkan KTM sesuai dengan jumlah yang disyaratkan KOPURWA.

Sementara pakar ilmu politik Meriam Budiardjo mengatakan ada 4 fungsi parpol dalam rangka pembangunan demokrasi, yakni *pertama* sarana komunikasi politik, *kedua* sarana sosialisasi politik, *ketiga* sarana rekrutmen kader dan anggota politik, *keempat* sarana pengatur konflik.<sup>16</sup> Dari keempat fungsi partai politik tersebut merupakan penafsiran dari nilai-nilai demokrasi yaitu partisipasi, kontrol rakyat melalui partai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai.

---

<sup>15</sup> Anwar, Kandidat Cawapres nomer 2, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 12 Juli 2013

<sup>16</sup> Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE,2006),150.

b). Kandidat Presiden dan Wakil Presiden

Kandidat Presiden dan Wakil Presiden merupakan mahasiswa yang diusung dan dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden DEMA IAIN Sunan Ampel Surabaya. Keduanya inilah yang menjadi bagian paling penting dalam setiap pemilu. Karena pada intinya hakikat dari pemilu adalah untuk memilih pemimpin (Presiden dan Wakilnya). Untuk memilih calon kandidat tersebut tidaklah mudah. Untuk mengusung mahasiswa menjadi kandidat juga merupakan tantangan bagi masing-masing partai yang akan mengusung kandidat calon Presiden dan wakilnya. Pertimbangan yang matang harus dilakukan oleh pengurus partai, karena kandidat tersebut juga sangat berpengaruh pada kesuksesan partai dalam pemilu. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain, bahwa kandidat tersebut adalah mahasiswa yang mempunyai loyalitas dan citra yang baik di kampus, baik itu dilihat dari akademisnya atau keaktifannya dalam berorganisasi, kandidat tersebut juga harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan partai yang mengusungnya, mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan amanah.

Pemilu raya mahasiswa 2013 ini diikuti oleh dua pasang kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden, pertama adalah M. Alaika Sa'dullah (Capres) dengan M. Chairil Anwar (Cawapres) yang diusung oleh Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) dan kedua adalah M. Imron Anshori (Capres) dan Syamsul Arifin (Cawapres) yang diusung oleh Partai Republik Mahasiswa (PAREM).

Kedua pasang calon tersebut mempunyai profil yang berbeda-beda, sebagaimana data yang diperoleh peneliti bahwa kandidat dari partai PRM diusung dari kader PMII Surabaya. Dimana Capres Alaika Sa'dullah merupakan mahasiswa semester 8 dari Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, dia juga aktifis PMII Surabaya Rayon Tarbiyah dan juga menjabat sebagai Ketua II dari UKM Seni Budaya, sedangkan Cawapresnya adalah mahasiswa semester 8 Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits yang juga merupakan aktifis PMII Surabaya dan mantan anggota Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin.

Adapun lawannya yaitu dari partai PAREM yang mengusung Capres M. Imron Anshori mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 8 yang juga merupakan aktifis PMII Surabaya Selatan (SS). Dan Cawapresnya Syamsul Arifin adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-ahwal Asy-syahsiyah semester 6 dan dia juga aktifis di *Community of Santyi Scholars or Ministry of Religius (CSS Mora)*.

Untuk menjadi kandidat Capres dan Cawapres dalam pemilu raya mahasiswa, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain: mereka harus duduk minimal semester 5 atau 7, IPK minimal 2,50 dan pernah menjabat sebagai pengurus organisasi intra kampus. Persyaratan ini merupakan ketentuan yang tercantum dalam UU

Pemilu Raya Mahasiswa.<sup>17</sup>

Untuk menjadi negara yang demokratis diperlukan unsur-unsur yang mendukung tegaknya demokrasi. Salah satu unsur pendukung itu adalah infrastruktur politik, yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok kepentingan.<sup>18</sup> Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi yaitu selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, mereka juga sebagai sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi yaitu peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik.

Keberadaan partai politik merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan atas kedaulatan para mahasiswa. Karena dengan adanya partai-partai politik itulah segala aspirasi mahasiswa yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur. Jika kedaulatan di tangan mahasiswa, maka kekuasaan politik harus dibangun mulai dari bawah. Konsekwensinya kepada para mahasiswa harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik.

#### **4. Verifikasi**

Verifikasi merupakan tahapan seleksi bagi mereka yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilu raya mahasiswa. Dalam tahapan ini panitia

---

<sup>17</sup> UU Tentang Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik (PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013, Bab V Pasal 13

<sup>18</sup> Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, 149.

penyelenggara pemilu atau KOPURWA memeriksa kelengkapan data atau berkas-berkas administrasi dari masing-masing pendaftar. Dalam proses ini KOPURWA memberikan jangka waktu jika ada partai yang belum lengkap administrasinya. Menurut beberapa informan dalam proses ini KOPURWA mengeluarkan beberapa kebijakan yang memberatkan kubu partai. Antara lain terkait waktu sosialisasi dan pendaftaran yang sangat pendek. Hal ini dirasa berat karena persyaratan yang diajukan oleh KOPURWA juga berat. Oleh karena itu dalam pemilu kali ini hanya diikuti oleh partai lama yang masih mempunyai basis masa besar di IAIN.

KOPURWA mengadakan rapat pleno dengan pengurus partai di kantor sekretariat KOPURWA (BTN lama IAIN sunan Ampel Surabaya) pada hari Senin, 25 Maret 2013 tepat pukul 13.00. Rapat tersebut membahas partai-partai yang lolos verifikasi dan pengambilan nomer urut partai. KOPURWA mengumumkan bahwa kedua partai yang mendaftar, yaitu PRM dan PAREM lolos dalam verifikasi dan dinyatakan sah sebagai peserta pemilu raya mahasiswa 2013, pengesahan ini dibuktikan dengan SK KOPURWA No. 03/KOPURWA/IAIN-SA/IV/2013 tentang hasil verifikasi partai. Setelah itu dilanjutkan dengan pengambilan nomer yang diwakili oleh ketua partai yang dilakukan secara acak. PRM mendapat nomor 1 sedangkan PAREM dengan nomer 2.

## **5. Kampanye**

Kampanye merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu kampanye diartikan sebagai

kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada para pemilih. Pelaksanaan kampanye yang baik harus mempertimbangkan berbagai variabel yang melekat pada kehidupan misalnya, tingkat pendidikan, budaya, agama atau keyakinan dan nilai-nilai sosial yang berlaku.<sup>19</sup>

Seperti halnya pada kandidat capres-cawapres pada umumnya, bahwasannya pada tahapan kampanye selalu adanya visi dan misi agar membuat menarik para mahasiswa untuk memilih. Adapun visi misi dari kandidat capres dan cawapres pada nomer 1 yaitu M. Alaika Sa'dullah dan Chairil Anwar mempunyai visi dan misi yang lebih mengutamakan pada pelayanan terhadap mahasiswa. Capres dari PRM yaitu M. Alaika Sa'dullah mengatakan

“visi dan misi kami adalah mewujudkan DEMA IAIN Sunan Ampel Surabaya yang Aspiratif, Berkualitas, Bertanggung Jawab, dan Bermoral. Misi kami yaitu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen mahasiswa, menjadi jembatan aspirasi bagi seluruh elemen mahasiswa kepada pihak birokrat kampus, mempersiapkan inovasi baru untuk membawa IAIN Sunan Ampel Surabaya kearah yang lebih baik. Menurut kami visi dan misi ini kami ambil dari beberapa aspirasi mahasiswa dan saya rasa visi dan misi ini memang merupakan kebutuhan dan keinginan dari banyak mahasiswa IAIN, yakni terkait pelayan DEMA sebagai wakil mahasiswa di tingkat institut yang seharusnya bisa menjadi wadah aspirasi mahasiswa”<sup>20</sup>

Sedangkan visi dan misi dari koalisinya yaitu pasangan M. Imron Anshori dan Syamsul Arifin juga tidak mau kalah dalam mengemas visi dan misi untuk meraih simpati yang lebih banyak lagi. Visi kandidat nomer 2 ini adalah tidak

---

<sup>19</sup> Asep Saiful Muhtadi, *Kampanye Politik*, (Bandung: Humaniora, 2008), 83

<sup>20</sup> Alaika Sa'dulah, Kandidat Capres nomer 1, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 29 Juni 2013

hanya menyajikan pelayanan yang baik terhadap mahasiswa, tetapi juga berusaha memberikan inovasi dalam program kerja dan kegiatan DEMA. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Imron Anshori

“kami ingin melakukan perubahan yang lebih baik pada DEMA IAIN Sunan Ampel kedepan. Dan fokus yang kami tekankan adalah pelayanan mahasiswa dan inovasi kegiatan. Karena kami mencoba untuk merangkul dan melibatkan semua mahasiswa IAIN dalam program-program kami juga. Jadi visi dan misi kami ingin menjadikan IAIN Sunan Ampel Surabaya berkarakter (Bermoral dalam berkarya, intelek dalam bergerak, terpadu dalam komunikasi dan advokasi) dengan misinya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal dan advokasi kepada seluruh mahasiswa, menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan seluruh mahasiswa, memperkuat jaringan komunikasi yang sinergis dan berkelanjutan dengan lembaga-lembaga di lingkungan kampus, memberikan pengembangan kepada civitas akademika dalam setiap program kerja berlandaskan nilai-nilai moral dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.”<sup>21</sup>

Adanya visi dan misi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan simpati dan dukungan juga dari mahasiswa. dan visi misi inilah yang nantinya disuarakan dalam orasi pada saat kampanye. Selain itu berbagai cara juga dilakukan untuk merancang proses kampanye dengan semenarik mungkin. Karena dari kampanye inilah para peserta pemilu menarik simpati mahasiswa. Kompetisi mulai terasa ketika kampanye, karena langkah awal masing-masing partai dan kandidatnya memperkenalkan diri kepada mahasiswa. Visi dan misi digembor-gemborkan secara semarak dan tidak lupa menggunakan spanduk, banner, sticker, dan atribut yang mulai disebarakan kepada seluruh mahasiswa.

Kampanye di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini dilakukan dua tahap yaitu kampanye tahap pertama dinamakan kampanye atribut dan tahap

---

<sup>21</sup> Imron Anshori, kandidat Capres nomer 2, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 03 Juli 2013

kedua adalah kampanye oral. Kampanye atribut adalah proses sosialisasi yang dilakukan peserta pemilu melalui media. Adapun media yang biasa digunakan di kampus ini adalah menggunakan spanduk, banner, stiker, pamflet dan lain sebagainya yang isinya biasanya berupa gambar kandidat dan logo partai disertai dengan visi misi atau kalimat-kalimat persuasif. Kampanye atribut ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung mulai dari tanggal 28 sampai 31 Maret 2013. Dan jika sudah melewati jangka waktu tersebut maka semua atribut tersebut harus sudah tidak terpasang di area kampus, dan bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut akan dikenai sanksi yang sudah ditetapkan oleh KOPURWA.

Untuk kampanye atribut ini kedua partai peserta pemilu nampaknya kurang mempersiapkan dengan baik. Hal ini terbukti karena masih jarang sekali pamflet atau spanduk yang terpasang. Misalnya partai PRM, partai nomer 1 ini hanya sedikit menyebarkan pamflet dan selebaran-selebaran di sekitar area kampus dan yang nampak terlihat hanya di sekitar fakultas Syari'ah dan fakultas Ushuluddin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua PRM

“koordinator sosialisasi partai PRM adalah dari mahasiswa syari'ah dan ushuluddin, mereka memberitahu kepada kami jika pamflet yang dipasang hanya ada di dua fakultas saja. Ini semua dikarenakan waktu dan keadaan yang serba mendadak dan memang dari kubu kami juga tidak begitu menekankan sosialisasi pada proses kampanye, tetapi sosialisasi di luar kampus yang lebih kami utamakan<sup>22</sup>

Partai PAREM yang tidak mau kalah juga menempelkan pamflet di gedung-gedung tiap fakultas, tempat-tempat umum, mading dan jalan sekitar

---

<sup>22</sup> Elit, ketua PRM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 10 Juni 2013.



kampus. Pada hari Senin tanggal 01 April tepatnya ketika kampanye oral, menurut pengamatan peneliti atribut yang berupa pamflet, spanduk, atau selebaran lain masih banyak menempel di dinding-dinding fakultas. Padahal dalam aturan kampanye hal tersebut merupakan suatu pelanggaran dan mendapatkan sanksi dari KOPURWA, karena seharusnya ketika waktu kampanye oral tidak ada atribut yang menempel di lingkungan kampus. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut sepertinya biasa saja dan tidak mendapatkan respon dari penyelenggara pemilu.



Gambar IV. 1  
Gambar Kampanye atribut

Adapun Kampanye tahap kedua yaitu kampanye oral, kampanye oral merupakan proses sosialisasi partai dan kandidat yang diusungnya secara langsung bertatap muka dengan semua mahasiswa. Biasanya proses ini dilakukan dengan arak-arakan keliling kampus. Kegiatan tersebut juga diramalkan oleh semua anggota partai, kandidat yang diusung dan partai koalisi. Kampanye ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 april 2013. Kampanye oral kemarin terbilang sangat menarik, karena semua kandidat

berusaha menampilkan penampilan terbaiknya dalam mengkonsep dan mengemas kampanye oral tersebut.

Kampanye oral ini KOPURWA membagi jadwal kampanye untuk kedua PPM, yakni giliran pertama kampanye adalah untuk partai PRM dan giliran kedua untuk partai PAREM. Urutan ini disesuaikan dengan nomor partai dalam kertas suara. Untuk kampanye urutan pertama dilaksanakan pukul 08.00-09.30 dan urutan kedua pukul 10.00-11.30. Namun dalam kenyataan dilapangan ternyata partai PAREM yang melakukan kampanye pertama. Hal ini dikarenakan kesiapan yang kurang matang dari partai PRM. Akhirnya kebijakan yang diambil oleh KOPURWA adalah memberikan kesempatan kampanye ulang bagi PRM yakni pukul 12.00-13.30. Menurut pernyataan dari kandidat PRM, adanya perubahan jadwal tersebut dikarenakan pemberitahuan yang mendadak dari KOPURWA

“kami memang ikut kampanye tapi tidak sesuai jadwal, karena anggota kami baru di kabari oleh KOPURWA pada malam harinya sebelum paginya diadakan kampanye. Untuk peserta nomer 1 kampanye dilakukan pagi jam 08.00 secara otomatis kita belum melakukan persiapan apa pun. Awalnya memang semua mengira bahwa kandidat dari nomer 1 tidak mengadakan kampanye, akan tetapi KOPURWA mengatakan bahwa kita di kasih waktu kampanye pada pukul 12.00. Jadi kami melakukan kampanye seadanya saja, ini semua memang serba mendadak”<sup>23</sup>

Pemindahan jadwal kampanye untuk partai PRM ini awalnya tidak diterima oleh pihak partai oposisi. Mereka menilai bahwa hal tersebut adalah murni karena kesalahan dan ketidaksiapan dari partai PRM. Karena beberapa hari sebelumnya KOPURWA sudah memberitahukan jadwal tersebut kepada

---

<sup>23</sup> Alaika Sa'dulah, Kandidat Capres nomer 1, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 30 Juni 2013

masing-masing partai. Bahkan mendekati hari kampanye KOPURWA juga mengirim pesan singkat (SMS) kepada masing-masing Ketua Partai yang isinya himbauan agar menyiapkan kampanye oral dengan sebaik mungkin disamping menginfokan kembali jadwal kampanye. Salah satu anggota KOPURWA mengatakan bahwa

“KOPURWA sudah memberi tahukan jadwal kampanye kepada seluruh peserta pemilu yakni dengan cara kami adakan rapat pleno bersama pengurus partai yang membahas tentang kampanye. Dan akhirnya kami sepakat kampanye atribut diadakan mulai tanggal 28-31 Maret 2013 dan kampanye oral tanggal 01 April 2013 dengan urutan, yaitu PRM nomer 1 pada pukul 08.00-09.30 dan PAREM nomer 2 pada pukul 10.00-11.30, bahkan disini ketika mendekati hari H, Nur Hakim selaku ketua KOPURWA sendiri juga menginfokan kembali jadwal kampanye sekalipun lewat pesan singkat (SMS), dan menurut saya hal itu dikarenakan kurang kesiapan dari partai nomer 1”.<sup>24</sup>

Kampanye oral dimulai pada hari Senin tanggal 1 April 2013 pukul 10.00-11.30 yang dimulai dengan partai PAREM. Penampilan pertama dari PAREM sangatlah menarik. Mereka berkeliling memutar kampus menggunakan kereta keliling (odong-odong) dan diiringi group banjari dibelakangnya, yang dimulai dari fakultas tarbiyah sebagai start awal kampanye. Kedua pasangan dari partai tersebut didudukkan di kursi paling depan kereta, setelah itu mereka turun dan masuk ke kelas-kelas dengan langsung bertatap muka kepada mahasiswa, kemudian kandidat dari partai ini berorasi menyuarakan visi dan misinya, sekaligus meminta dukungan dan do'a dari semua mahasiswa. Kampanye PAREM ini berakhir tepat jam 11.30 dengan Fakultas Syari'ah sebagai batas akhir kampanye.

---

<sup>24</sup> Ramdan, anggota KOPURWA, wawancara di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 21 Juni 2013



Gambar IV. 2  
Kampanye Oral dan Kampanye Atribut PAREM

Kampanye dilanjutkan pukul 12.00-13.30 yaitu dari partai PRM. Partai ini pun tidak mau kalah dengan partai PAREM. Berbeda dengan PAREM, partai dengan nomor 1 ini berkampanye menggunakan arak-arakan partai dan pendukungnya, serta dengan spanduk besar berisikan foto kandidat dan partai dengan kata-kata persuasifnya “Bersatu dan Bergerak” yang mengawali arak-arakan kampanye partai ini. Dan Kandidatnya M. Alaika Sa’dullah dinaikkan di atas motor Vespa dengan membawa megaphone untuk berorasi dan menyuarakan visi dan misi serta dukungannya kepada semua mahasiswa. Kampanye partai PRM mengambil start dari Blok M kemudian berorasi di depan setiap gedung fakultas yang dilewati, seperti Syari’ah, Ushuluddin, Adab, Dakwah dan finishnya di Fakultas Tarbiyah gedung B.



Gambar IV. 3  
Kampanye PRM dan Kandidatnya

Selain kampanye formal sebagaimana tertulis di atas, peserta pemilu juga menggunakan media lain untuk sosialisasi dan kampanye. Contohnya seperti partai PAREM yang menggunakan media informasi dan jejaring sosial untuk sosialisasi. Mereka mengirimkan SMS ke mahasiswa-mahasiswi yang isinya meminta do'a dan dukungan. Mereka juga memasang pamflet di beberapa kos-kosan dan pesantren mahasiswa yang berada disekitar kampus.

Sedangkan lewat jejaring sosial mereka membuat grup yang di dalamnya berupa kata-kata dukungan untuk kandidat mereka yaitu M. Imron Anshori dan Syamsul Arifin. Grup tersebut diberi nama "Ayo...Dukung Capres IAIN Supel M. Imron Anshori". Grup ini dibuat oleh tim sukses dari PAREM, kemudian tim sukses tersebut mengundang semua mahasiswa IAIN yang sudah berteman dengan mereka ke dalam grup tersebut. Sehingga mahasiswa bisa dengan mudah mengenal partai dan kandidatnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua partai PAREM

"kami rasa kampanye kemarin masih kurang efektif untuk sosialisasi, oleh karena itu kami mencari cara lain untuk sosialisasi dan mencari dukungan. Dan setelah kami musyawarahkan dengan tim sukses, akhirnya kami sepakat untuk mengambil media informasi dan jejaring sosial, karena kami fikir itu termasuk strategi yang bagus untuk sosialisasi dan mencari dukungan. Media informasi yang kami gunakan adalah pamflet dan sms.

Pamflet kami sebar dan pasang ke beberapa pesantren mahasiswa dan kos-kosan. Sedangkan dari Via SMS kami kirim dan sebar SMS mulai hari kedua sebelum pencoblosan, tentunya pada malam hari kami mngirimnya. Untuk yang jejaring sosial kami membuat grup di facebook yang kami namai “Ayoo...Dukung Capres IAIN Supel M. Imron Anshori”. Adminnya adalah dari tim sukses partai PAREM. Kemudian kami sebagai admin mengajak dan mengundang semua mahasiswa IAIN yang sudah berteman dengan mereka ke dalam grup tersebut. Dan mereka yang sudah menjadi anggota grup diminta untuk mengundang mahasiswa IAIN lainnya untuk masuk ke grup tersebut. Dan alhamdulillah cara ini kami rasa cukup efektif untuk sosialisasi dan mencari dukungan”.<sup>25</sup>



Gambar IV. 4  
Sosialisasi PAREM dari Jejaring Sosial

Berbeda dengan partai PAREM, partai oposisinya yaitu PRM menggunakan strategi yang sedikit berbeda dengan PAREM. Partai PRM menggunakan kosma (ketua kelas) untuk mengumpulkan dan mengkondisikan mahasiswa, bekerja sama dengan UKM dan ORMADA, membentuk koordinator di beberapa pesantren mahasiswa, dan mereka juga mencalonkan kandidat capresnya dari Fakultas yang sama dengan kandidat dari PAREM dan dari ras MADURA, dan cawapresnya adalah aktifis dari organisasi intra. Menurut pendapat dari ketua partai PAREM mengatakan

<sup>25</sup> Huda, ketua PAREM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 12 Juni 2013

“strategi yang diterapkan mereka cukup bagus. Bahkan kita sempat kaget ketika mengetahui calonnya berasal dari fakultas tarbiyah juga dan dari Madura. Mungkin mereka ingin memecah suara di Tarbiyah. Memang efeknya cukup besar, karena Tarbiyah merupakan basis masa terbesar partai kami ”.<sup>26</sup>

Kegiatan kampanye kemarin memang cukup menarik perhatian mahasiswa, terutama pada tahapan pemilu oral. Hal ini dikarenakan kandidat dari masing-masing partai bertatap muka secara langsung kepada mahasiswa dengan menggunakan tampilan pertunjukkan kampanye yang menarik. Berbeda dengan kampanye atribut yang terkesan sepi. Karena prosesnya hanya menempelkan pamflet dan selebaran, itu hanya dilakukan oleh partai PAREM, sedangkan yang PRM tidak mengikuti kampanye atribut.

Proses pemilu ini juga mendapatkan respon dari mahasiswa IAIN, dari beberapa mahasiswa yang diwawancarai sebagian ada respon yang positif dan negatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wibi salah seorang mahasiswa IAIN

“pemilu kemrin saya rasa tidak maksimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor. Antara lain waktu kampanye yang sangat singkat dan terkesan mendadak. Saya tidak melihat pamflet, selebaran, banner atau yang lainnya di kampus. Ya dampaknya sosialisasi kepada mahasiswa juga kurang. Tidak sedikit mahasiswa yang belum mengenal partai dan kandidat capres dan cawapres pada pemilu kali ini. Jika sudah demikian, trus bagaimana mahasiswa memilih wakil mahasiswa mereka yang sesuai dengan hati nurani mereka”.<sup>27</sup>

Pendapat yang disampaikan informan di atas menggambarkan bahwa proses kampanye tersebut belum berjalan maksimal, terutama dalam

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Wibi, mahasiswa semester 6 fakultas adab, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 01 Juni 2013

teknisnya. Kampanye atribut dimulai hari Kamis 28 Maret sampai hari Ahad 31 Maret 2013 jadi kampanye tersebut hanya maksimal dua hari, kemungkinan atribut tersebut bisa dilihat dan dibaca oleh mahasiswa yaitu hari Kamis dan Jum'at. Pada hari Sabtu dan Ahad perkuliahan di kampus libur, tentunya atribut yang sudah terpasang tersebut tidak bisa terbaca oleh mahasiswa. Oleh karena itu banyak juga mahasiswa yang tidak tahu tentang partai dan kandidat yang mencalonkan diri pada pemilu kemarin.

Tetapi ada juga mahasiswa yang merasa bahwa kampanye kemarin sudah menarik dan menunjukkan kerja yang maksimal dari partai dan kandidat. Sebagaimana yang diungkapkan mahasiswi IAIN Sunan Ampel

“kampanye tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, tahun kemarin kurang menarik dan kreatif. Memang tidak banyak atribut yang tertempel di area kampus. Tapi kampanye oralnya yang menurut saya dapat menarik banyak simpati dari mahasiswa. Bahkan jika saya lihat kemarin ada salah satu kandidat yang bisa bersosialisasi langsung bertatap muka dengan mahasiswa-mahasiswi”.<sup>28</sup>

## **6. Proses Pemungutan Suara**

Pemungutan suara dalam Pemilu DEMA atau memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak di semua fakultas dalam satu hari yaitu tanggal 03 April 2013 di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tanggal pemungutan suara tersebut telah disepakati dan ditetapkan oleh KOPURWA sebagai penyelenggara Pemilu. Sebelum proses pemungutan suara ini KOPURWA sudah melakukan beberapa persiapan, seperti mendata jumlah mahasiswa, mencetak kertas suara, membentuk panitia di setiap distrik, menentukan

---

<sup>28</sup> Kholid, mahasiswa semester 10 fakultas tarbiyah, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 09 Juli 2013



tempat dan waktu pemungutan suara serta mengadakan rapat konsolidasi dengan pengurus partai.

Langkah awal sebelum proses pencoblosan yang dilakukan oleh KOPURWA adalah mendata mahasiswa aktif dari setiap fakultas. Dalam hal ini KOPURWA meminta data langsung dari akademik setiap fakultas, yaitu data mahasiswa aktif tahun 2012-1013. Namun dalam pencoblosan kali ini KOPURWA membatasi jumlah pemilih dengan menetapkan bahwa pemilih adalah mahasiswa aktif mulai angkatan 2009 (semester 8) sampai angkatan 2012 (semester 2).

Selanjutnya KOPURWA mencetak kertas suara. Dalam pemilu kali ini KOPURWA mencetak kertas suara sebanyak 4000 kertas suara. KOPURWA memilih percetakan di daerah Madura, karena setiap tahunnya KOPURWA mencetak kertas suara di percetakan tersebut. Namun dalam prosesnya ternyata terjadi kesalahan, yakni dalam proses editor gambar kertas suara partai. Dimana gambar kedua partai tersebut bertukar posisi. Seharusnya partai PRM dengan No.1 berada di sebelah kiri, dan PAREM dengan No.2 di sebelah kanan, akan tetapi posisi tersebut terbalik. Mengetahui kejadian ini KOPURWA tidak langsung mengambil kebijakan sendiri. Ketua KOPURWA Nur Hakim memberitahukan kejadian tersebut kepada Presiden DEMA dimisioner Imam Nawawi. Akhirnya Nawawi memutuskan agar setelah kertas suara itu dicetak semua KOPURWA langsung mengganti nomer partainya dengan spidol. Sebagaimana disampaikan oleh ketua KOPURWA:

“masalah kesalahan editor pada kertas suara partai adalah mutlak kesalahan dari anggota KOPURWA, saya pun sudah mengadakan rapat dengan pengurus partai dan saya meminta maaf akan hal tersebut, karena tidak mungkin dengan kertas suara yang sudah dicetak dengan sedemikian banyak terus kita cetak ulang lagi, jelas waktunya tidak cukup”.<sup>29</sup>

Kejadian ini tidak langsung dapat diterima oleh beberapa pihak, termasuk pengurus partai, karena secara tidak langsung hal ini dapat merugikan pihak partai. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengurus partai PAREM:

“saya tidak tahu kejadian ini ada rekayasa politik atau tidak, tetapi yang jelas ini memberikan kerugian bagi partai PAREM, karena dari beberapa anggota kami mengeluhkan jika banyak mahasiswa dari pendukung partai kami yang salah mencoblos, kerena kebanyakan dari mereka tidak membaca nama partainya tapi lebih melihat pada posisi partai dalam kertas suara”.<sup>30</sup>

Kejadian tersebut memang merupakan suatu kerugian bagi salah satu partai, tetapi hal tersebut sudah tidak dipermasalahkan. Karena partai PAREM sudah berhasil meloloskan kandidatnya sebagai Presiden DEMA IAIN Sunan Ampel Surabaya, sebagaimana disampaikan Sekretaris dari PAREM:

“kami memang sangat kecewa dengan kejadian kesalahan dalam kertas suara, dan kami tidak mau menyalahkan pihak manapun. Kami merasa puas karena kandidat kami dan kader terbaik kami bisa lolos menjadi Presiden DEMA IAIN Sunan Ampel Surabaya 2013”.<sup>31</sup>

Beberapa hari sebelum pencoblosan, KOPURWA membentuk anggota di setiap distrik, di mana jumlah anggota di setiap distrik sebanyak empat mahasiswa. Anggota tersebut bertugas mendata mahasiswa yang akan memilih, membagikan kertas suara, dan memberi tanda bagi mahasiswa yang sudah mencoblos, yakni dengan mencelupkan ujung jarinya ke dalam tinta.

---

<sup>29</sup> Nur Hakim, ketua KOPURWA, wawancara, di kantin IAIN Sunan Ampel, tanggal 17 Juni 2013

<sup>30</sup> Huda, ketua PAREM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 12 Juni 2013

<sup>31</sup> Shihab (nama samaran), sekretaris PAREM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 19 Juni 2013

Kemudian setelah panitia terbentuk, KOPURWA menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan waktunya. Untuk waktu pencoblosan dimulai serentak pada hari Rabu, 03 April 2013 pukul 08.00-13.00. Adapun TPSnya diletakkan di setiap distrik, yaitu Tarbiyah, Adab, Dakwah, Ushuluddin, dan Syari'ah. Di fakultas Tarbiyah TPS diletakkan di dalam Gedung. A tepatnya di pintu masuk gedung. Di fakultas Adab TPS dibangun di halaman Gedung baru fakultas Adab. Di fakultas Dakwah TPS dibangun di halaman depan gedung B Fakultas Dakwah. Di Fakultas Ushuludin TPS dibangun di tengah taman surga di depan Gedung A Fakultas Ushuluddin. Dan di fakultas Syari'ah TPS di bangun di halaman parkir Gedung B Fakultas Syari'ah. Setiap TPS dibangun dengan sederhana, TPS tersebut seperti layaknya TPS pada pemilu Negara, karena terdapat perlengkapan seperti kursi, meja, surat suara, kotak suara, bilik suara yang terbuat dari kardus, serta tinta yang digunakan untuk menandai mahasiswa yang sudah mencoblos.

Setelah semua persiapan dilakukan oleh KOPURWA, sebelum hari pelaksanaan pencoblosan, KOPURWA mengadakan rapat pleno lagi dengan pengurus partai pada hari Senin 01 April 2013 pukul 15.00 di kantor KOPURWA. Rapat kali ini membahas masalah mekanisme dalam pencoblosan. Dalam rapat kali ini menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Hakim, ketua KOPURWA, wawancara, di kantin IAIN Sunan Ampel, tanggal 18 Juni 2013

1. Untuk masalah kertas suara yang terjadi salah cetak, KOPURWA akan mengadakan pemberitahuan kepada mahasiswa dengan cara memasang pamflet yang isinya menjelaskan kertas suara yang salah tersebut.
2. Pencoblosan dimulai pukul 08.00-13.00
3. Mahasiswa yang mempunyai hak pilih adalah angkatan 2009 (semester 8) sampai angkatan 2012 (semester 2), dengan keseluruhan jumlah DPT yang terdaftar ada 8628
4. Bagi partai yang terbukti melakukan kecurangan, akan dikenakan sanksi pengurangan suara sebanyak 50 suara untuk 1 pelanggaran.
5. Setiap partai dipersilahkan menggunakan strategi politiknya, dengan catatan jangan sampai diketahui oleh KOPURWA.
6. Setiap partai diharuskan mendelegasikan 1 orang saksi di masing-masing distrik.

Proses pencoblosan dimulai pukul 08.00. Sebelumnya, KOPURWA sudah berkumpul dan menyiapkan segala sesuatunya di kantor KOPURWA (BTN lama), kertas suara pun sudah dimasukkan semuanya ke dalam kotak suara yang sudah disegel dan dijaga dengan ketat oleh anggota KOPURWA. Hal ini bertujuan agar tidak ada kecurangan seperti penambahan atau pengurangan kertas suara. Sebagaimana ditetapkan oleh KOPURWA bahwa kertas suara yang dibagikan ke setiap distrik itu berbeda-beda sesuai dengan kuota mahasiswa di setiap fakultas. Jumlah kertas suara sesuai dengan data yang peneliti dapatkan adalah; Fakultas Tarbiyah 1000 kertas suara, Fakultas Dakwah 1000 kertas suara, Fakultas Adab 700 kertas suara, Fakultas

Ushuluddin 500 kertas suara, dan Fakultas Syari'ah 700 kertas suara. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua KOPURWA Nur Hakim:

“kalau untuk pembagian kertas suara di tiap distrik memang kami bedakan kuotanya, soalnya jumlah mahasiswanya juga beda. Dan yang jadi pedomannya adalah pemilu kemarin, dimana minat mahasiswa untuk memilih dari tiap distrik juga berbeda. Tetapi jika kertas suara yang kami sediakan di tiap distrik tersebut kurang, maka bisa ditambah lagi, dengan cara mengambil kertas suara dari TPS yang kelebihan kertas suara“.<sup>33</sup>

Setelah KOPURWA dan Panitia pemilu berkumpul di depan kantor KOPURWA (depan BTN lama) untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, kemudian mereka berangkat ke TPS masing-masing distrik. Ketika tiba di TPS mereka mengecek kelengkapan TPS dan menghitung kertas suara yang ada di kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing partai. Sebelum pencoblosan dimulai terlebih dahulu KOPURWA menjelaskan langkah-langkah pencoblosan kepada mahasiswa yang ada di sekitar TPS, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1.



Gambar IV. 5

Mahasiswa menyetorkan KTM kepada panitia pemilu di meja pendaftaran

---

<sup>33</sup> Ibid,

2.



Gambar IV. 6

Mahasiswa mengambil kertas suara yang berjumlah dua macam, warna merah untuk kertas suara partai dan warna kuning untuk kertas suara kandidat

3.



Gambar IV. 7

Mahasiswa menuju bilik suara untuk memberikan suara (mencoblos)

4.



Gambar IV. 8

Mahasiswa memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara

5.



Gambar IV. 9

mahasiswa mencelupkan jari kelingkingnya pada tinta sebagai bukti telah memberikan suaranya (mencoblos)

Proses pemungutan suara awalnya berjalan dengan lancar. Masing-masing TPS dipenuhi oleh mahasiswa dan tim sukses dari partai yang ikut menggiring mahasiswa ke TPS, tentunya agar mereka mencoblos partai dan kandidat mereka. Terutama di Fakultas Tarbiyah, TPS di Tarbiyah merupakan TPS yang paling ramai, hal ini dikarenakan kandidat Presiden DEMA semuanya berasal dari Tarbiyah. Maka dari itu, tidak heran jika pemandangan di Tarbiyah dipenuhi oleh pendukung dari PAREM dan PRM.



Gambar IV. 10  
TPS Fakultas Tarbiyah

Tim sukses dari kedua partai yang meramaikan TPS Tarbiyah ini saling berebut untuk mengantarkan mahasiswa yang mendukung partainya ke TPS. Karena jumlah kertas suara yang disediakan di Tarbiyah hanya 1000 kertas suara. Jumlah kertas suara yang terbatas ini membuat kedua tim sukses yang ada di Tarbiyah harus bergegas cepat untuk segera mengantarkan mahasiswa yang akan memilih partai dan kandidat mereka. Adanya kedua tim sukses di TPS Tarbiyah ini tak jarang menimbulkan gesekan emosional antar kedua tim. Menurut pengamatan peneliti, dampak tersebut mengakibatkan adanya perdebatan antara tim sukses dari kedua kubu. Menurut salah seorang informan mengungkapkan bahwa penyebabnya adalah ada tindakan propokatif dari yang dilakukan oleh salah seorang dari tim sukses partai PRM.

“kita sebenarnya tidak mau bermasalah, tetapi tindakan mereka memprofokasi mahasiswa itu tidak bisa kita terima. Kita juga punya tim sukses yang merangkul mahasiswa untuk mendukung kami, tapi bukan dengan cara fulgar seperti itu. Sebelumnya sudah kami tegur dengan perkataan halus, tapi dia tidak menggubris, akhirnya tim kami dari PAREM tidak bisa menahan emosi dan terjadi adu mulut.”<sup>34</sup>

Tetapi informan lain mengungkapkan bahwa penyebab perdebatan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh mereka yang tahun lalu tidak lolos dalam verifikasi.

“saya rasa tindakan perdebatan memang sudah biasa terjadi dalam pemilu raya, tapi dalam pemilu raya tahun 2013 saya menduga bahwa tindakan tersebut hanyalah akal-akalan yang dilakukan oknum tertentu untuk menggagalkan pemilu raya tahun ini. Mungkin mereka dari partai yang tidak lolos dalam pemilu tahun lalu, sebagai bentuk protes mereka terhadap sistem kampus.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Shihab (nama samaran), sekertaris PAREM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 19 Juni 2013

<sup>35</sup> Ramdan, anggota KOPURWA, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 21 Juni 2013



Adanya permasalahan di fakultas Tarbiyah ini memang sempat dilaporkan kepada KOPURWA dan sempat diproses, tetapi KOPURWA tidak memberikan sanksi apa pun dikarenakan setelah diintrogasi ternyata kejadian tersebut diprovokasi oleh oknum lain yang ingin merusak jalannya pemilu, dan oknum tersebut bukan termasuk dari salah satu tim sukses partai.

Fakultas Tarbiyah juga merupakan basis masa terbesar dari PMII Surabaya Selatan, kader-kadernya hampir menyeluruh di semua jurusan di Fakultas Tarbiyah, dan mereka adalah kader aktif. Oleh karena itu organisasi ekstra yang lain di fakultas Tarbiyah merupakan organisasi yang minoritas.

Fakultas Tarbiyah juga merupakan fakultas asal dari kedua kandidat capres. Hal ini juga yang menyebabkan fakultas ini ramai, terlebih ketika kedua kandidat capres ini melakukan pencoblosan yang dikawal oleh tim sukses dari masing-masing kandidat. Meskipun kedua kandidat capres berasal dari fakultas yang sama, tetapi hasil akhir perolehan suara antara kedua kandidat tersebut di TPS ini sangat jauh selisihnya. Dimana akhirnya perolehan suara di Tarbiyah dimenangkan oleh kandidat capres nomer 2 dengan perolehan 905 suara dan kandidat nomer 1 memperoleh 132 suara.

Selain fakultas Tarbiyah, di fakultas-fakultas yang lain terbilang sepi dari pemilih. Sebagaimana yang terjadi di fakultas Dakwah, yang merupakan fakultas kedua dengan jumlah mahasiswa terbesar setelah Tarbiyah. Menurut pengamatan peneliti hal ini dikarenakan sebagian perkuliahan fakultas Dakwah dipindahkan. Karena fakultas tersebut tahun ini sedang mengadakan renovasi gedung. Hal ini juga yang mengakibatkan kurangnya pemberitahuan

yang didapat mahasiswa terkait adanya proses pemilu.

Namun meskipun di fakultas ini jarang pemilih, menurut pengakuan informan yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa di TPS Dakwah juga terdapat kecurangan dalam proses pencoblosan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu saksi

“ketika saya bertugas di TPS Dakwah, saya menemui beberapa kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa, saya tidak tahu dia dari kubu mana. Bentuk kecurangannya yaitu adanya pencoblosan berulang. Mahasiswa ini masuk dan mencoblos beberapa kali di TPS, tapi dia pintar, sesuatu yang dia kenakan itu berganti-ganti, kadang baju, tas, sepatu, krudung, dan lain-lain. Padahal sudah jelas itu mahasiswa tetap yang sudah mencoblos”.<sup>36</sup>

Fakultas yang lebih ramai selain Tarbiyah adalah Fakultas Adab. Jika dilihat dari jumlah mahasiswanya, memang fakultas ini lebih sedikit dari Dakwah, namun banyak mahasiswa dari Fakultas Adab yang berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini dikarenakan tempat TPSnya yang strategis dan juga pengondisian mahasiswa di Fakultas ini terbilang mudah. TPS Fakultas ini dibangun di halaman depan gedung B Fakultas Adab. Pada pemilu kali ini Fakultas Adab merupakan basis masa terbesar dari PMII Surabaya dan mereka memaksimalkan suara mereka di fakultas ini.

Hal ini dikarenakan pengurus Komisariat PMII Surabaya sekarang dijabat oleh mahasiswa dari fakultas Adab. Oleh karena itu beban yang lebih berat ada di kader PMII Surabaya yang ada di Fakultas Adab, karena mereka juga tidak mau kepengurusan mereka dianggap gagal. Namun dari data yang diperoleh peneliti dari informan, di fakultas ini juga terjadi beberapa

---

<sup>36</sup> SJ (nama samaran), Saksi PAREM, wawancara, di kampus IAIN, tanggal 07 Juni 2013

kecurangan. Hampir sama dengan di fakultas Dakwah, di fakultas ini juga terdapat mahasiswa yang mencoblos kertas suara lebih dari satu. Hal ini sebagaimana pengakuan dari salah seorang saksi:

“keadaan TPS di Adab selalu ramai, mereka selalu datang dengan rombongan banyak dan bergerombol di depan tempat pendaftaran, makanya saya yang menjadi saksi harus teliti mengamati mereka. Karena saya rasa ini salah satu strategi mereka. Dan terbukti saya beberapa kali menjumpai mahasiswa yang mencoblos lebih dari satu kertas suara.”<sup>37</sup>



Gambar IV. 11  
TPS Fakultas Adab

Fakultas selanjutnya adalah Ushuluddin, penyelenggaraan pemilu difakultas ini berlanjar lancar. TPS dibangun di tengah halaman gedung A fakultas Ushuluddin. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu kandidat cawapres juga berasal dari fakultas ini, yaitu Cawapres dari nomer 1 Khoiril Anwar. Dari 500 kertas suara yang disediakan, mahasiswa yang ikut mencoblos hanya 263 mahasiswa dengan perolehan suara terbanyak untuk pasangan nomer 1 yaitu sebesar 222 suara dan pasangan nomer 2 mendapat 31 suara. TPS ini termasuk fakultas yang sedikit jumlah mahasiswanya dibanding fakultas lain juga termasuk TPS yang lumayan ramai para pemilihnya.

<sup>37</sup> Bobby (nama samaran), saksi dari PAREM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 09 Juni 2013

Sebagaimana pengamatan peneliti ketika masa kampanye, di fakultas ini juga masih jarang ada pamflet atau selebaran partai dan kandidat. Fakultas Ushuluddin merupakan fakultas yang paling sedikit mendapat jatah surat suara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh KOPURWA

“kami sudah membagi kertas suara sesuai dengan minat mahasiswa dalam pemilu, hal ini kita lihat dari hasil pemilu raya tahun yang kemarin, dan untuk fakultas yang paling sedikit mendapatkan kertas suara adalah Ushuluddin.”<sup>38</sup>

Ternyata di TPS ini juga ada sedikit permasalahan yang terkait dengan KTM, menurut informan dari mahasiswa Ushuluddin mengatakan bahwa

“sempat terjadi bentrok antara pihak PRM dengan panitia, ada salah satu pemilih menggunakan kartu perpustakaan tidak diperbolehkan karena KTMnya hilang, padahal di TPS Tarbiyah dibolehkan untuk mencoblos menggunakan kartu perpustakaan”<sup>39</sup>

Akan tetapi bentrokan itu tidak lama hanya sebatas perdebatan, karena dari pihak KOPURWA telah menyelesaikan sedikit permasalahan yang ada di TPS tersebut yang itu dengan memperbolehkan mereka untuk mencoblos setelah jam 11.00. hal ini sebagaimana di jelaskan oleh ketua KOPURWA Nur Hakim

“memang diperbolehkan memilih menggunakan kartu perpustakaan, akan tetapi ada waktu tertentu yaitu pada pukul 11.00-13.00 WIB. Selain itu tidak diperbolehkan”<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Najib, sekretaris KOPURWA, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 20 Juni 2013

<sup>39</sup> Dhima (nama samaran), mahasiswa fakultas Ushuluddin semester 4, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 13 Juni 2013

<sup>40</sup> Nur Hakim, ketua KOPURWA, wawancara, di kantin IAIN Sunan Ampel, tanggal 18 Juni 2013



Gambar IV. 12  
TPS Fakultas Ushuluddin

Adapun penyelenggaraan pemilu raya di fakultas Syari'ah juga berjalan lancar. Tapi pemandangannya juga hampir sama dengan fakultas Dakwah. TPS di fakultas ini tampak sepi dari mahasiswa yang memilih. Padahal sebagaimana kita tahu juga bahwa cawapres nomer 1 yaitu Syamsul Arifin berasal dari fakultas tersebut. Bahkan tim sukses dari masing-masing partai tidak terlihat seperti fakultas lainnya. Menurut pengamatan peneliti, pada saat pemilu Fakultas Syari'ah juga sedang mengalami renovasi gedung, jadi banyak kelas perkuliahan yang dipindah ke masjid kampus atau ada juga yang di fakultas lain. Dari sini bisa dilihat bahwa banyak mahasiswa yang tidak ikut memilih dikarenakan memang ruang kelas kuliah mereka di luar fakultas Syari'ah. TPS di fakultas ini dibangun di area parkir gedung B fakultas Syari'ah. Hasil akhir perolehan suara di fakultas ini juga sangat minim, terbukti dari 700 surat suara yang disediakan, hanya 204 mahasiswa yang mencoblos. Di TPS ini juga dimenangkan oleh pasangan kandidat nomer 1 dengan perolehan suara 140 dan 59 suara untuk pasangan kandidat nomer 2.

## 7. Perhitungan Suara dan Pengesahan

Proses penghitungan suara merupakan proses yang sangat menentukan dalam pemilu, dalam proses ini semua surat suara yang sudah dicoblos oleh mahasiswa dihitung oleh KOPURWA. Namun sebelum penghitungan suara dimulai, terlebih dahulu KOPURWA mengadakan rapat pleno dengan pengurus partai dan semua saksi pemilu. Rapat ini diadakan tepat setelah proses pencoblosan selesai yaitu pukul 13.00 di kantor KOPURWA. Dalam rapat ini semua pengurus KOPURWA wajib hadir, semua saksi, dan pengurus partai yang diwakili ketua dan sekretaris partai.

Hal-hal yang dibahas dalam rapat pleno kali ini adalah laporan Koordinator KOPURWA dari tiap-tiap distrik tentang proses pemungutan suara dan laporan masing-masing saksi terkait ada atau tidaknya kecurangan dalam proses tersebut. Mulai dari menghitung surat suara untuk partai, dilanjut penghitungan surat suara untuk kandidat capres cawapres. Proses ini diadakan terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh semua mahasiswa. Pada pemilu raya kali ini tempat perhitungan diadakan di depan kantor KOPURWA yaitu gedung BTN lama, mulai pukul 15.00-01.00 dini hari.



Gambar IV. 13  
Proses Penghitungan dan Pengesahan Kertas Suara

Kemudian setelah proses penghitungan selesai pukul 01.00 dini hari, KOPURWA mengumumkan hasil perolehan suara kepada seluruh mahasiswa, yang sebelumnya hasil perolehan suara tersebut sudah di sahkan oleh ketua partai, ketua KOPURWA dan kepala bagian kemahasiswaan rektorat yaitu Bapak Taufiq. Untuk persentase hasil suara partai akan masuk dalam anggota MUSEMA, dan suara terbanyak partai akan menduduki ketua MUSEMA disini MUSEMA diibaratkan sebagai badan legislatif. Sedangkan suara terbanyak untuk kandidat akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun hasil perolehan suara pemilu raya mahasiswa 2013, adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 3**

**HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MAHASISWA**

<b>Fakultas</b>	<b>PRM</b>	<b>PAREM</b>	<b>TIDAK SAH</b>
ADAB	336 suara	40 suara	28 suara
USHULUDDIN	221 suara	38 suara	4 suara
SYARIAH	136 suara	61 suara	7 suara
TARBIYAH	210 suara	843 suara	36 suara
DAKWAH	158 suara	42 suara	5 suara
<b>Total</b>	<b>1061 suara</b>	<b>1024 suara</b>	<b>80 suara</b>

Surat Laporan Hasil Kegiatan Pemilu Raya Mahasiswa

Tabel IV. 4

**HASIL PEROLEHAN SUARA CAPRES DAN CAWAPRES**

<b>Fakultas</b>	<b>Alaika saktullah dan khoiril anwar</b>	<b>M. imron anshori dan syamsul arifin</b>	<b>TIDAK SAH</b>
ADAB	322 suara	33 suara	47 suara
USHULUDDIN	222 suara	31 suara	10 suara
SYARIAH	140 suara	59 suara	5 suara
TARBIYAH	132 suara	905 suara	53 suara
DAKWAH	147 suara	49 suara	8 suara
<b>Total</b>	<b>963 suara</b>	<b>1077 suara</b>	<b>123 suara</b>

Sumber: Surat Laporan Hasil Kegiatan Pemilu Raya Mahasiswa

**8. Pelantikan**

Proses pelantikan ini merupakan proses pengesahan dan peresmian Presiden DEMA terpilih dan Ketua MUSEMA. Dimana Presiden DEMA merupakan kandidat dengan perolehan suara terbanyak dan Ketua MUSEMA diambil dari partai dengan perolehan suara terbanyak. Dalam hal ini Presiden terpilih adalah M. Imron Anshori dan Wakilnya Syamsul Arifin, sedangkan Ketua dan Sekretaris MUSEMA diambil dari partai PRM yaitu Joko Habibi sebagai Ketua MUSEMA dan M. Khoirur Rosyid sebagai sekretaris. Acara pelantikan ini diadakan di ruang sidang rektorat pada 24 Mei 2013. Adapun yang melantik adalah Prof. Dr. H. Abd. A'la selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian prosesi pelantikan tersebut dilanjutkan acara pelantikan kabinet DEMA yang dilantik oleh M. Imron Anshori selaku Presiden DEMA IAIN Sunan Ampel Surabaya terpilih.



Dari hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa data yang berhasil ditemukan oleh peneliti. Data tersebut merupakan beberapa penemuan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara sistem atau aturan yang ada dalam UU pemilihan umum raya dan UU partai politik mahasiswa, data tersebut antara lain, *Pertama*, Pemilihan ketua dan sekretaris KOPURWA tidak melalui musyawarah tetapi melalui sistem tunjuk, yaitu dengan di tunjuk langsung oleh presiden DEMA demisioner. Padahal sudah jelas tertulis di UU Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PURWA) BAB III tentang Penyelenggaraan dan Organisasi pasal 5 menjelaskan bahwa “penyelenggaraan PURWA dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa disingkat KOPURWA yang bebas, mandiri, jujur dan adil ,yang mendapat rekomendasi dari DEMA dan SEMA”. Padahal sebenarnya jika kita menganut asas LUBER dan JURDIL seharusnya untuk pemilihan ketua dan sekretaris harus melalui musyawarah.

*Kedua*, jumlah pendelegasian anggota KOPURWA sebanyak 4 mahasiswa dari masing-masing distrik yang telah dipilih dan disepakati SEMA. Tugas SEMA mengirimkan nama-nama yang akan di jadikan anggota KOPURWA dan diserahkan kepada Ketua KOPURWA yang kemudian diturunkan Surat Keputusan (SK) agar nantinya anggota KOPURWA diakui. Dalam Undang-Undang PURWA pada BAB III tentang penyelenggaraan dan organisasi berbunyi bahwa “keanggotaan KOPURWA terdiri dari 2 orang direkomendasikan oleh DEMA dan 2 orang dari masing-masing fakultas yang di rekomendasikan SEMA”. Akan tetapi pada kenyataannya untuk memilih

anggota KOPURWA ada 4 mahasiswa yang direkomendasikan dari tiap-tiap distrik. Hal ini dikarenakan agar 2 anggota lain bisa diroling pada distrik lain dan 2 anggota tetap menjaga di distrik asal mereka. Demi menjaga keamanan dari kecurangan serta agar kinerja kami juga bisa maksimal. Ini tidak dimaksudkan melanggar UU, tetapi upaya mewujudkan pemilu yang tertib.

*Ketiga*, adanya rangkap tugas, dimana tugas KOPURWA adalah sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai pengawas pemilu. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemilihan Umum Raya Mahasiswa KOPURWA adalah badan yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara pemilu harus dilakukan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum raya mahasiswa (PURWA) seharusnya dibentuk panitia pengawas pemilu atau yang sering kita sebut PANWASLU. Sebenarnya KOPURWA dan PANWASLU merupakan instansi yang berbeda, dimana KOPURWA hanya bertugas sebagai penyelenggara dan PANWASLU adalah sebagai panitia yang mengawasi jalannya pemilu, mengurus permasalahan yang terkait dengan kecurangan dan konflik yang ada dalam pemilu. Hal ini sebagaimana tertulis dalam UU tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa BAB IV pasal 9 ayat 1 dan 2 bahwa

Pasal 1 berbunyi: “Dalam rangka pelaksanaan PURWA dibentuk panitia pengawas pelaksana pemilu yang selanjutnya disingkat PANWASLU”.

Pasal 2 berbunyi: “Keanggotaan PANWASLU terdiri dari unsur Partai Politik Mahasiswa (PPM) masing-masing 5 orang dan wakil DEMA 5 orang”.

Namun dalam praktek pemilu raya mahasiswa di IAIN Sunan Ampel 2013 ini KOPURWA merangkap tugas, yakni sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Menurut Ketua KOPURWA, KOPURWA adalah badan independen yang mengatur jalannya pemilu dan mengeluarkan kebijakan sendiri. Dalam pemilu kali ini KOPURWA mengambil kebijakan untuk tidak mendirikan PANWASLU, dikarenakan KOPURWA menganggap bahwa secara fungsi tugas KOPURWA dan saksi sudah termasuk dalam tugas untuk mengawasi jalannya pemilu. Hal ini berarti pada pemilu kali ini KOPURWA tidak membentuk institusi yang bernama PANWASLU, KOPURWA hanya mengalihfungsikan tugas pengawas pemilu kepada beberapa anggota KOPURWA dan saksi padahal menurut UU tentang Pemilihan Umum Raya tugas KOPURWA terhadap PANWASLU hanya sebatas menetapkan kepengurusan dan susunan anggota PANWASLU, dalam arti KOPURWA tidak mempunyai wewenang untuk merekomendasikan atau menentukan siapa-siapa yang menjadi PANWASLU. Hal ini sebagaimana bunyi UU tentang Pemilihan Umum Raya BAB IV Pasal 9 ayat 5 “Kepengurusan dan susunan anggota PANWASLU ditetapkan oleh KOPURWA”.

*Keempat*, tidak adanya pedoman tentang aturan atau sanksi tertulis terkait pelanggaran atau tindak kecurangan dalam proses pemilu. Dalam surat keputusan KOPURWA tentang peraturan pelaksanaan pemilu raya mahasiswa IAIN hanya menjelaskan bahwa pada waktu hari pencoblosan dilarang bagi peserta pemilu melakukan kampanye dalam bentuk apapun (Selebaran, massa, provokasi. dll). Ketika ada pelanggaran terkait hal tersebut maka KOPURWA

mempunyai kebijakan untuk memproses dan memberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan. Jadi sangsi di sini tidak tertulis, akan tetapi jika ada pelanggaran dalam proses pemilu, maka yang berhak memberikan sangsi atas pelanggaran itu adalah kebijakan dari KOPURWA. Dan menurut ketua KOPURWA jika ada kecurangan yang terjadi pada proses pemungutan suara (pencoblosan), maka sanksinya adalah pengurangan suara sejumlah 50 kertas suara untuk 1 kecurangan dengan syarat pelanggaran tersebut diketahui KOPURWA dengan diperkuat saksi dan bukti.

Data berikutnya yang ditemukan oleh peneliti adalah ketidaksesuaian antara proses penyelenggaraan pemilu raya dengan kriteria pemilu yang demokratis. Data-data tersebut yaitu: *Pertama*, dari kriteria yang sudah dijelaskan, bahwa salah satu kriteria pemilu yang demokratis itu tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologi yang berbeda. Tujuannya agar menjadikan pemilu itu sebagai kompetisi politik, ideologi dan kompetisi antar kandidat. Akan tetapi dalam pemilu raya mahasiswa kandidat yang lolos verifikasi dari latar belakang ideologi yang sama yaitu dari organisasi PMII. Yang membedakannya dari segi internal dan eksternal. Dimana dari segi internal yaitu untuk fungsionalisasi efektifitas kader, pemaksimalan potensi kader, terlalu banyaknya kader. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu karena di IAIN merupakan PMII besar, secara praktis PMII Cabang tergolong cabang yang besar tidak seperti kampus lain, meminimalisir kader yang pindah ke organisasi lain.

*Kedua*, kebebasan dalam memberikan suara, kriteria ini menjelaskan bahwa pemilih mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan. Dalam PURWA ini membatasi hak para pemilih untuk memilih, dimana kertas suara yang disiapkan tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan mahasiswa di setiap distriknya. Untuk kertas suara hanya ditentukan dengan kuota mahasiswa di setiap distriknya serta melihat berapa peminat mahasiswa untuk ikut memilih dan mengacu pada pemilu tahun lalu.

*Ketiga*, dalam penghitungan suara pemilu DEMA memang dilakukan di tempat terbuka, hal ini dimaksudkan agar semua mahasiswa bisa melihat proses penghitungan tersebut. Namun dalam proses penghitungan kemarin terdapat kejanggalan yakni adanya perbedaan hasil penghitungan suara antara kertas suara partai dengan kertas suara kandidat. Dari permasalahan ini, sekilas kita melihat proses ini memang dilakukan secara jujur dan terbuka. Namun perbedaan hasil tersebut seharusnya tidak terjadi, karena kertas suara yang dibagikan kepada mahasiswa juga sama, yaitu setiap mahasiswa mencoblos dua kertas suara, kertas suara partai dan kertas suara kandidat. Kejujuran dalam penghitungan kertas suara sangat penting karena jika terdapat kecurangan dalam penghitungan bisa mengakibatkan gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk ke dalam badan perwakilan rakyat.

Selain temuan data di atas, peneliti juga mendapatkan beberapa pelanggaran dan tindak kecurangan yang terjadi selama berjalannya proses

pemilihan umum raya mahasiswa 2013. Pelanggaran dan tindak kecurangan tersebut lebih tepatnya terjadi pada proses pemungutan suara di beberapa distrik. Hal tersebut merupakan pelanggaran dan kecurangan yang diketahui oleh saksi yang menjaga di TPS. Data tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>41</sup>

**Tabel IV. 5**  
**BENTUK-BENTUK PELANGGARAN DALAM PEMILU RAYA MAHASISWA**

No.	Jenis Kecurangan atau Pelanggaran	Distrik	Jumlah
1.	Penambahan kertas suara	Tarbiyah	100 kertas suara
2.	Adanya pemilih yang tidak sesuai dengan DPT yaitu angkatan 2008	Tarbiyah	6 mahasiswa
3.	Penggelembungan suara, adanya beberapa mahasiswa yang mencoblos lebih dari 1 kali	Dakwah dan Adab	2-3 mahasiswa

Sumber: Saksi PRM dan PAREM

Permasalahan yang pertama kali dilaporkan dalam rapat tersebut adalah masalah penambahan kertas suara di fakultas Tarbiyah, selain itu di fakultas ini juga ada mahasiswa dari angkatan 2008 (semester 10) sebanyak 6 orang yang ikut mencoblos. Awalnya terjadi perdebatan dalam permasalahan ini antar KOPURWA dan pengurus partai. Karena menurut pengurus partai itu adalah kesalahan panitia yang ada di TPS Tarbiyah, namun salah seorang dari KOPURWA juga mengatakan jika itu adalah kecurangan yang dilakukan oleh

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan saksi dari kedua partai, di kampus IAIN Sunan Ampel,

salah satu partai. Akhirnya Ketua KOPURWA mengambil jalan penyelesaian untuk mengambil 6 kertas suara partai dan 6 kertas suara kandidat, pengambilan tersebut dilakukan oleh masing-masing ketua partai sebanyak 3 kertas suara kandidat dan 3 kertas suara partai ketika perhitungan suara Fakultas Tarbiyah.

Selain itu di Tarbiyah juga terdapat permasalahan mengenai penambahan kertas suara sebanyak 100 lembar kertas suara. tetapi ternyata masalah tersebut hanyalah *miss communication* antara koordinator distrik dengan ketua KOPURWA, dimana ketika Koordionator distrik menambah 100 kertas suara untuk Tarbiyah dia tidak meminta izin terlebih dahulu kepada ketua KOPURWA. Akhirnya KOPURWA menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai, karena ini hanya *miss communication* antar pengurus KOPURWA. Karena sesuai dengan peraturan, jika sebelum waktu pencoblosan habis kertas suara di distrik itu habis, maka panitia atau KOPURWA boleh menambah lagi kertas suaranya.

Kemudian di fakultas Dakwah juga terdapat mahasiswa yang mengulang kertas suara, di fakultas Adab juga terdapat pengulangan dalam pencoblosan. Permasalahan yang diungkapkan oleh saksi tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan besar, karena saksi tersebut tidak mempunyai data yang valid untuk menggugat kecurangan tersebut, seperti foto, rekaman, atau lainnya dan juga pengurus partai dan saksi yang akhirnya sepakat untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut lebih besar lagi.

Dari semua hasil temuan data yang dihasilkan oleh peneliti tentang proses penyelenggaraan pemilu raya mahasiswa 2013, dapat dikatakan bahwa proses penyelenggaraannya tidak sepenuhnya demokratis. Karena dari beberapa penemuan di atas masih adanya ketidaksesuaian antara proses penyelenggaraan pemilu raya dengan kriteria pemilu demokratis dan UU pemilihan umum raya mahasiswa, disamping itu pendapat tersebut juga diperkuat dengan adanya beberapa permasalahan seperti perdebatan dan beberapa pelanggaran yang terjadi di dalamnya.

## **B. Implikasi Pemilihan Umum Raya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)**

### **IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013 Terhadap Mahasiswa**

Setelah adanya pemilu raya mahasiswa DEMA 2013 di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diselenggarakan, peneliti telah menemukan beberapa data yang menjadi dampak dari adanya penyelenggaraan pemilu. Beberapa dampak tersebut berimbas cukup besar bagi kehidupan sosial dan keorganisasian di kampus. Dari analisis peneliti dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut:

#### **1. Konflik antar mahasiswa**

Konflik antar mahasiswa yang dimaksud disini adalah adanya disharmonisasi atau ketidak harmonisan yang terjadi antar anggota atau pendukung dari masing-masing partai. Yaitu antara PAREM dan PRM. Ketidakharmonisan ini biasanya dilatarbelakangi oleh kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu atau adanya kebijakan-kebijakan yang



memihak pada salah satu kubu partai. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan dari partai PRM:

“Adanya disharmonisasi atau ketidak akuran di internal mahasiswa atas terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara dan sering kali KOPURWA berat sebelah dalam menentukan kebijakan yang berimplikasi pada perpecahan partai”<sup>42</sup>

Contoh adanya ketidak harmonisan tersebut juga muncul sejak awal dimulainya acara pencoblosan. Sebagaimana telah diceritakan di atas bahwa dalam pemilu raya 2013 ini terjadi perdebatan antar kubu partai yang terjadi di fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin.

Adanya disharmonisasi ini memang sering terjadi dalam setiap pemilu, karena pemilu juga sifatnya kompetisi yang hasil akhirnya adalah menang atau kalah. Namun dalam penyelenggaraan pemilu raya ini kubu yang kalah, yaitu partai PRM yang gagal meloloskan kandidatnya menjadi presiden DEMA merasa bahwa dalam pemilu ini banyak permainan politik dan tidak adilnya KOPURWA dalam menentukan kebijakan. Mereka merasa banyak kecurangan yang dilakukan dalam pemilu, terutama dalam proses pencoblosan dan perhitungan suara. Salah satu buktinya yaitu dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan dari pihak kandidat partai PRM yang mengatakan:

“KOPURWA tidak ideal, contohnya kebijakan KOPURWA yang membolehkan mahasiswa baru mencoblos dengan Kartu Perpustakaan, dengan syarat di atas jam 11.00. Namun kebijakan ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan aturan. Dibeberapa distrik selain di Ushuluddin mahasiswa baru yang mencoblos menggunakan Kartu Perpustakaan

---

<sup>42</sup> David, sekretaris PRM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 22 Juni 2013

diperbolehkan mencoblos sejak awal dimulainya waktu pencoblosan.”<sup>43</sup>

Dari wawancara di atas jelas terlihat bahwa ada ketidakpuasan dari partai PRM terhadap kinerja KOPURWA. Mereka juga menilai bahwa hal ini dikarenakan pemilihan KOPURWA dilatarbelakangi oleh organisasi ekstra kampus yang ikut terlibat dalam pemilu raya mahasiswa ini.

## 2. KOPURWA yang Kurang Independen

Kurangnya Independensi pada KOPURWA dikarenakan KOPURWA belum bisa berdiri sendiri. Dalam arti adanya KOPURWA masih diback up oleh salah satu organisasi ekstra yang ada di IAIN. Oleh karena itu ada pendapat dari sebagian informan yang mengatakan bahwa pemilu kali ini masih diwarnai permainan politik dari organisasi ekstra kampus. Hal ini yang mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan KOPURWA tidak lagi bersifat objektif atau hanya memihak kepada salah satu golongan yang berkepentingan.

“kinerja mereka kurang objektif. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka masih *diback up* oleh organisasi ekstra. Dan tidak heran jika pemilu kali ini diwarnai permainan politik. Karena pemilu juga merupakan ladang meraih kekuasaan bagi mereka, apalagi pemilu setingkat DEMA”<sup>44</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh kandidat capres nomer 1

“pemilu kali ini kurang ideal, karena ditemukan kesalahan-kesalahan dari pihak lain yang dibenarkan oleh KOPURWA. Dan juga kami melihat mereka terkesan sama-sama sekubu. Misalnya dalam pencoblosan tiba-tiba adanya penambahan kertas suara yang belum disepakati dan dirapatkan oleh masing-masing ketua partai maupun anggota KOPURWA lainnya”<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Biby, tim sukses PRM, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 14 Juni 2013

<sup>44</sup> Heru (nama samaran), wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 04 Juni 2013

<sup>45</sup> Alaika Sadulah, Kandidat Capres nomer 1, wawancara, di kampus IAIN Sunan Ampel, tanggal 30 Juni 2013

### 3. Tingginya angka Golput

Pemilu kali menunjukkan angka golput yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya mahasiswa yang bersikap apatis. Mereka seakan tidak mau tahu dengan adanya penyelenggaraan pemilu di kampus. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa tidak ada dampak positif dari terselenggaranya pemilu di kampus, dan mereka juga berfikir bahwa pemilu hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh organisasi ekstra untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Cara pandang mereka terhadap pemilu kebanyakan mengarah kepada sesuatu yang sifatnya negatif, oleh karenanya mereka memilih untuk tidak tahu menahu masalah pemilu, karena tidak ada manfaat sama sekali untuk kehidupan mereka di dunia kampus. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Silvia salah seorang mahasiswi dari fakultas Syari'ah yang mengatakan bahwa:

“saya melihat pemilu raya sekarang apatis dan jarang ada peminatnya. Saya menilai bahwa pemilu itu tidak ada epeknya sama sekali untuk mahasiswa yang jarang ikut organisasi-organisasi atau bukan mahasiswa aktifis. Dan menurut saya pemilu itu hanya mengandalkan kepentingan organisasi semata yang menguntungkan beberapa kelompok kepentingan saja, toh jika berhasil yang merasakan dampak positifnya juga hanya di kalangan kelompok tersebut dan juga hanya bisa menghabiskan uang”<sup>46</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh pendapat dari salah satu anggota KOPURWA yang sudah diwawancari oleh peneliti. Dia mengatakan bahwa

“pemilu kali ini cukup sepi, dibanding dengan pemilu yang kemarin, ini mungkin terjadi karena mahasiswa sendiri tidak tau bahwa telah diadakannya pemilu atau mungkin mereka pribadi tidak tertarik dengan adanya pemilu. Padahal kami selaku penyelenggara pemilu sudah

---

<sup>46</sup> Silvia, mahasiswa semester 8 fakultas syari'ah, wawancara, di kost informan, tanggal 02 Juni 2013

berusaha dengan semaksimal mungkin”.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Bapak Taufik salah seorang dari bagian kemahasiswaan rektorat yang diberi tanggung jawab mengawasi jalannya pemilu mengatakan

“menurut saya Sikap apatis mahasiswa itu mungkin disebabkan kurangnya sosialisasi pemilu, atau bisa juga mahasiswa itu jarang dilibatkan oleh DEMA dalam kegiatannya. Makanya mahasiswa merasa adanya pemilu itu tidak akan ada dampaknya bagi mahasiswa”.<sup>48</sup>

Hal ini nampaknya memang menjadi masalah tersendiri bagi mereka yang menjadi wakil mahasiswa. Karena dengan adanya permasalahan seperti ini merupakan sebuah bukti bagaimana mereka belum bisa mewujudkan suatu pemerintahan yang demokrasi, salah satunya karena mereka belum bisa merangkul semua mahasiswa untuk ikut serta dalam proses pemilu raya mahasiswa. Dari data yang peneliti dapatkan dari KOPURWA, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam pemilu raya tahun 2013 ini adalah 2.165 untuk semua kertas suara partai dan 2.163 untuk kertas suara kandidat. Dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa dalam pemilu raya mahasiswa ini mahasiswa yang ikut serta atau memenuhi hak pilihnya hanya mencapai 25% dari jumlah seluruh mahasiswa, Dimana jumlah mahasiswa IAIN Sunan Ampel untuk tahun akademik 2013 adalah sebanyak 8628 orang mahasiswa.

Pemilu tahun 2013 ini berakhir dengan kemenangan partai PRM yang berhasil menduduki jabatan di MUSEMA, sedangkan untuk jabatan Presiden dan wakil presiden DEMA dimenangkan oleh M. Imron Anshori dan

---

<sup>47</sup> Najib, sekretaris KOPURWA, wawancara, di kantin IAIN Sunan Ampel, tanggal 20 Juni 2013

<sup>48</sup> Bapak Taufiq, wawancara, di ruang kemahasiswaan rektorat, tanggal 02 Juli 2013

Syamsul Arifin dari partai PAREM. Meskipun demikian pemilu kali ini memang berjalan dengan lancar dan semua tahapan terlaksana, namun untuk mengatakan pemilu raya mahasiswa 2013 ini demokrasi nampaknya masih belum bisa terwujud pada tahun ini. Karena dari data-data yang didapatkan oleh peneliti dan juga dengan melihat praktek penyelenggaraannya masih ada ketidaksesuaian antara sistem pemilu dengan praktek penyelenggaraannya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan masih belum bisa menciptakan pemilu raya yang demokratis. Apalagi jika kita melihat implikasinya yang juga belum bisa menunjukkan perubahan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh

“saya tidak ikut mencoblos untuk pemilu sekarang, dan selama saya menjadi mahasiswa saya tidak pernah merasakan pengaruh dari pimpinan hasil pemilu bahkan dari awal saya kuliah tidak mengenal satu pun presiden DEMA. Dan sepengetahuan saya juga tidak berdampak apapun. Yang saya nilai dalam pemilu dikampus hanya mencari kekuasaan saja, tetapi setelah jadi biasa saja tidak ada dampak dan pengaruh, mungkin hasil dari pemilu yang merasakan hanya pada mahasiswa-mahasiswa tertentu yang memiliki kepentingan”.<sup>49</sup>

Jika demikian maka sudah jelas bahwa pemilu sebagai alat ukur demokrasi sudah bisa menjawab bagaimana sistem demokrasi kampus yang ada di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagian besar mahasiswa merasa bahwa adanya pemilu ini masih belum memberikan dampak dalam dunia kampus, apalagi dampak secara langsung yang dirasakan mahasiswa hampir tidak ada. Hal ini tidak sesuai dengan sistem demokrasi yaitu pemerintahan

---

<sup>49</sup> Virda, mahasiswa semester 8 fakultas Dakwah, wawancara, di kost informan, tanggal 27 Juni 2013

untuk rakyat (*goverment of the people*). Jika kita cermati teori ini tidak berkesinambungan dengan kenyataan yang sekarang ada di keorganisasian mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, yakni mereka yang sekarang menjadi wakil mahasiswa belum bisa merangkul dan mengayomi mahasiswa. Hal ini berarti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka belum berpihak pada mahasiswa dan belum bisa mensejahterakan mahasiswa.

Selain itu, peneliti juga mendapatkan data-data mengenai harapan mahasiswa yang menginginkan adanya perubahan sistem yang lebih baik dan pemimpin yang dapat mensejahterakan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, yakni dengan kebijakan dan program-program mereka yang melibatkan mahasiswa dan semua elemen yang ada di kampus, serta memenuhi janji mereka yang disampaikan melalui visi dan misi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut ini:

“kami sebagai mahasiswa IAIN juga punya hak untuk merasakan adanya sebuah perubahan yang lebih baik, salah satunya jika adanya sistem yang lebih demokratis dan program kerja yang direncanakan benar-benar menyentuh semua elemen kampus dan melibatkan semua organisasi mahasiswa ekstra agar berjalan beriringan”.<sup>50</sup>

Pendapat di atas adalah salah satu gambaran aspirasi mahasiswa yang mengharapkan adanya sistem demokrasi yang lebih baik di keorganisasian mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya ke depannya. Sebuah sistem yang benar-benar berpihak kepada mahasiswa, bukan untuk kepentingan pribadi para wakil mahasiswa atau golongan tertentu. Karena selama ini kebanyakan dari mahasiswa melihat para wakilnya yang berada di DEMA belum

---

<sup>50</sup> Silvia, mahasiswa semester 8 fakultas syari'ah, wawancara, di kost informan, tanggal 02 Juni 2013

sepenuhnya berpihak kepada mahasiswa. Mereka lebih mementingkan kelompok mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang mahasiswa

“selama ini DEMA dan organ intra lain masih belum berpihak sepenuhnya kepada mahasiswa, karena mereka juga disetir oleh organisasi ekstra yang dulunya juga ikut mensukseskan dirinya dalam pemilu raya. Makanya tidak heran jika para wakil mahasiswa sekarang hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya”.<sup>51</sup>

Sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan maknanya yaitu sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>52</sup> Karena jika kita ukur sebuah sistem demokrasi itu dari sebuah pemilu, maka sistem di IAIN masih belum bisa dikatakan pemilu yang demokratis, karena masih banyak dari mereka yang belum merasakan efek atau dampak dari adanya keorganisasian mahasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

---

<sup>51</sup> ibid

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Revita aditama, 2010), 29.